



RENCANA KERJA Tahun 2024



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 yang memuat rencana program kegiatan dan target capaian kinerja dari pelaksanaan pembangunan perikanan dalam tahun anggaran 2024.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai acuan dan arah kebijakan pembangunan perikanan agar tujuan dan sasaran program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Atas kerjasama semua pihak Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 dapat tersusun dengan harapan mendapatkan dukungan dari semua pihak sehingga hasil pelaksanaan program dan kegiatannya nanti di tahun 2024 dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan.

Arga Makmur,

2023

Kepala Dinas ,


SUGIMIN. S.Pd, M.Pd
NIP. 19661103 198612 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 yang memuat rencana program kegiatan dan target capaian kinerja dari pelaksanaan pembangunan perikanan dalam tahun anggaran 2024.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai acuan dan arah kebijakan pembangunan perikanan agar tujuan dan sasaran program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Atas kerjasama semua pihak Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 dapat tersusun dengan harapan mendapatkan dukungan dari semua pihak sehingga hasil pelaksanaan program dan kegiatannya nanti di tahun 2024 dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan.

Arga Makmur

2023


Kepala Dinas ,
SUGIMIN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19661103 198612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan	49
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	51
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V. PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

II.1	Tabel SILPA Anggaran Tahun 2022.....	11
II.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencaiain Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	19
II.3	Tabel IKU Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	22
II.4	Indikator Kinerja Pada sasaran- 2 Meningkatnya Kinerja Birokrasi.....	23
II.5	Laporan Ralisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pendukung Sasaran 2.....	27
II.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	28
II.7	Review Terhadap Rancangan Awal (RANWAL) RKPD Tahun 2024.....	35
II.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	41
III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	55
IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	62

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Hubungan RENJA SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lain dan Dokumen Anggaran	4
1.2	Gambar Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).....	24
1.3	Proses Perbaikan dan Evaluasi Akip Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.....	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah pada Tahun 2022 serta permasalahan dan tantangan prioritas yang diestimasi akan terjadi pada Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan ini kemudian akan menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024, selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perikanan, yang secara substansi memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/subfungsi pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 sebagai dokumen rencana akhir rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

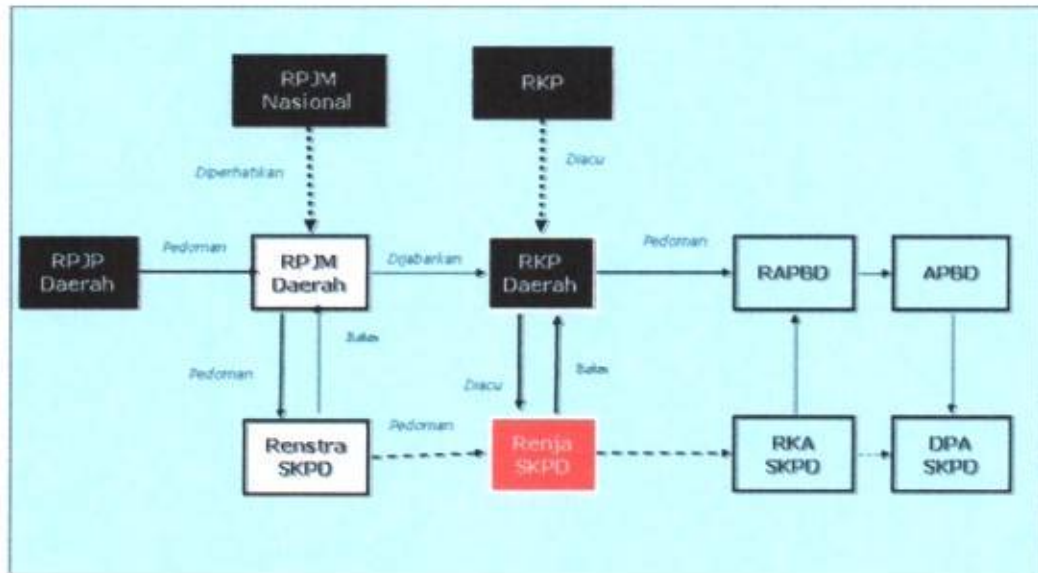
Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 secara operasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi tahun berkenaan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara khususnya dan Nasional pada umumnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar. 1.1 berikut :



Gambar. 1.1. Bagan Hubungan Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lain dan Dokumen Anggaran.

Mengacu pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD
- RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2023, RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2024, Rancangan Awal RPJM

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026, Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 61);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen

Dinas Perikanan di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai akselerasi pencapaian visi Bengkulu Utara 2021-2026.
- b. Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan tahun 2024.
- c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- f. Memberikan acuan bagi SKPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- g. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 ini disusun menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran Pendapatan dan belanja Dinas Perikanan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.075.080.011,- (Empat Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Sebelas Rupiah) dengan rincian satu untuk belanja Operasi sebesar Rp. 4.025.441.560,- dengan pembagian belanja pegawai/gaji Rp. 3.152.061.284,- (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 903.380.276 (Sembilan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), dua untuk belanja Modal dan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 19.638.451,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Dengan pertanggungjawaban realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Dari total anggaran APBD Dinas Perikanan sebesar Rp. 3.075.080.011,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Sebelas Rupiah) dan APBD-P Dinas Perikanan sebesar Rp. 630.000.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dari anggaran APBD dan APBD-P dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 3.364.828.167,- secara keseluruhan realisasi fisiknya 100 % dan realisasi keuangannya 82,57 % dengan sisa lebih anggaran (SILPA) Rp. 710.251.844,- (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), dengan rincian SILPA sebagai berikut :

Tabel. II.1. Tabel SILPA Anggaran Tahun 2022

No	Rekening	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Silpa	Sumber Dana
1	3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3,752,580,011	3,043,005,167	709,574,844	
	3 25 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,116,261,284	2,422,998,112	691,103,172	
	3 25 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,083,561,284	2,390,334,112	691,067,172	
		Belanja Gaji Pokok PNS	2,010,321,577	1,506,979,740	503,341,837	APBD
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	210,698,117	150,849,418	59,848,699	APBD
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142,257,968	115,830,000	26,427,968	APBD
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	69,120,000	66,960,000		APBD
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52,761,354	24,730,000	28,031,354	APBD
		Belanja Tunjangan Beras PNS	124,263,439	85,890,120	38,373,319	APBD
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS PNS	5,807,980	3,509,815	2,298,165	APBD
		Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji PNS	33,684	20,504	13,180	APBD
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4,941,491	3,087,706	1,853,785	APBD
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14,555,674	9,263,211	5,292,463	APBD
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	448,800,000	423,213,598	25,586,402	APBD
	3 25 01 2 02 02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32,700,000	32,664,000	36,000	
		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	29,100,000	29,100,000	-	APBD

		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	974,500	974,500	-	APBD
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,149,500	1,149,500	-	APBD
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	36,000	-	36,000	APBD
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000	1,440,000	-	APBD
	3 25 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25,600,000	25,600,000	-	
	3 25 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,600,000	25,600,000	-	
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3,400,000	3,400,000	-	APBD
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	22,200,000	22,200,000	-	APBD
	3 25 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205,315,420	196,607,746	8,707,674	
	3 25 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61,610,420	61,610,400	20	
		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	10,800,000	10,800,000	-	APBD
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,969,220	3,969,200	20	APBD
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,381,000	4,381,000	-	APBD
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	880,000	880,000	-	APBD
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan	538,200	538,200	-	APBD

		Kantor-Bahan Komputer				
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,170,000	1,170,000	-	APBD
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	420,000	420,000	-	APBD
		Belanja Obat Obatan Lainnya	290,000	290,000	-	APBD
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	9,560,000	9,560,000	-	APBD
		Belanja Natura dan Pakan-Pakan	29,602,000	29,602,000	-	APBD
3	25	01	2	06	05	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	10,597,000	10,597,000	-	
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10,597,000	10,597,000	-	APBD
3	25	01	2	06	06	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	7,808,000	7,776,000	32,000	
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7,808,000	7,776,000	32,000	APBD
3	25	01	2	06	09	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,300,000	116,624,346	8,675,654	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73,000,000	72,942,346	57,654	APBD, APBD-P, BTT
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52,300,000	43,682,000	8,618,000	APBD, APBD-P, BTT
3	25	01	2	07		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20,800,000	19,059,650	1,740,350	
3	25	01	2	07	06	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,800,000	19,059,650	1,740,350	
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	296,600	296,000	600	APBD-P

		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	864,949	864,900	49	APBD-P
		Belanja Modal Personal Komputer	17,920,950	17,898,750	22,200	APBD-P
		Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	1,717,501	-	1,717,501	APBD-P
3	25	01	2	08		
		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	140,876,407	137,085,359	3,791,048	
3	25	01	2	08	02	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	36,476,407	32,685,359	3,791,048	
		Belanja Tagihan Telepon	1,000,000	527,743	472,257	APBD
		Belanja Tagihan Air	6,000,000	5,999,949	51	APBD
		Belanja Tagihan Listrik	19,376,407	16,597,314	2,779,093	APBD
		Belanja Kawat/Faksimilo/Internet/TV Berlangganan	10,100,000	9,560,353	539,647	APBD
3	25	01	2	08	04	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104,400,000	104,400,000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52,320,000	52,320,000	-	APBD
		Belanja Jasa Tenaga Operator	14,400,000	14,400,000	-	APBD
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13,680,000	13,680,000	-	APBD
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16,800,000	16,800,000	-	APBD
		Belanja Jasa Tenaga Supir	7,200,000	7,200,000	-	APBD
3	25	01	2	09		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243,726,900	241,654,300	2,072,600	
3	25	01	2	09	01	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan	26,275,900	26,115,800	160,100	

		Dinas jabatan								
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19,206,000	19,199,300	6,700	APBD				
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4,264,000	4,264,000	-	APBD				
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,805,900	2,652,500	153,400	APBD				
3	25	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,741,000	26,028,500	1,712,500	
						Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,091,000	6,091,000	-	APBD
						Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5,205,000	5,205,000	-	APBD
						Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6,445,000	4,732,500	1,712,500	APBD
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	10,000,000	10,000,000	-	APBD
3	25	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,710,000	4,710,000	-	
						Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	1,830,000	1,830,000	-	APBD
						Belanja Pemeliharaan Komputer-	2,880,000	2,880,000	-	APBD

		Komputer Unit- Jaringan				
	3 25 01 2 09 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185,000,000	184,800,000	200,000	
		Honorarium Tim Pelaksana dan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3,000,000	3,000,000	-	APBD-P
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	182,000,000	181,800,000	200,000	APBD-P
2	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	305,000,000	304,328,000	672,000	
	3 25 04 2 04	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	305,000,000	304,328,000	672,000	
	3 25 03 2 04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	305,000,000	304,328,000	672,000	
		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1,800,000	1,800,000	-	APBD-P
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	149,800	149,800	-	APBD-P
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	394,100	394,100	-	APBD-P
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	461,100	461,100	-	APBD-P
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	55,000	50,000	5,000	APBD-P
		Honorarium Tim Pelaksana dan Kegiatan dan Sekretariat Tim	3,200,000	3,200,000	-	APBD-P

		Pelaksana Kegiatan				
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,640,000	2,640,000	-	APBD-P
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	295,000,000	294,333,000	667,000	APBD-P
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,300,000	1,300,000	-	APBD-P
3	3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	17,500,000	17,495,000	5,000	
	3 25 06 2 03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	17,500,000	17,495,000	5,000	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupate/ Kota	17,500,000	17,495,000	5,000	
		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1,200,000	1,200,000	-	APBD-P
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400,800	400,800	-	APBD-P
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	654,100	654,100	-	APBD-P
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,661,100	3,661,100	-	APBD-P
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	55,000	50,000	5,000	APBD-P
		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	61,000	61,000	-	APBD-P

		Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10,000,000	10,000,000	-	APBD-P
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,468,000	1,468,000	-	APBD-P
	JUMLAH 1+2+3		4,075,080,011	3,364,828,167	710,251,844	

Hambatan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

Secara umum kegiatan pembangunan perikanan tidak ada masalah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. II.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	2	5	2100	2,100	2	2	2	2
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	35	35	30	30	35	55	35	35
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD (unit)	11	3	11	12	3	3	11	11
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	5	3	5	3	5	5	5	5
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	100	100	12	12	12	12
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	100	100	12	12	12	12
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	2	2	100	100	2	1	2	2
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	21	21	100	100	21	16	21	21
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	20	17	100	100	17	10	19	20
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	6	1	100	1	6	100	6	6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

MISI 4 RPJMD : Membangun Ekonomi Kerakyatan

SASARAN 1 SKPD : Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan perikanan

Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan /formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama akan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel II.3 Tabel IKU Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan

URAIAN	SATUAN	TARGET TA.2022	REALISASI		CAPAIAN 2022
			TA. 2021	TA. 2022	
Persentase pertumbuhan Produksi Perikanan Pertahunan	100%	1,55%	1,155 %	1,55 %	100 %

Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan pertumbuhan PDRB sektor perikanan di tahun 2021 adalah munculnya wabah covid -19 dan diikuti oleh refocusing kegiatan sehingga berkurangnya anggaran APBD murni SKPD. Namun untuk mencapai target realisasi di Tahun 2022 persentase pertumbuhan produksi, perikanan pertahunan adalah sebesar 1,55% sesuai target Tahun 2022 sehingga capaian dihasil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah 100%

MISI 4 RPJMD : Membangun Ekonomi Kerakyatan

SASARAN 2 SKPD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

Dalam sasaran ini terdapat satu 1 satu indikator kinerja utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan /formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran kedua akan diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel II.4 Indikator Kinerja Pada Sasaran -2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

URAIAN	SATUAN	TARGET TA.2022	REALISASI		CAPAIAN
			TA. 2021	TA. 2022	2022
Nilai/predikat AKIP SKPD	100%	BB	B	BB	100%

Realisasi yang digunakan adalah capaian Tahun 2022 dikarenakan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara tidak melaksanakan reuiu terhadap dokumen SAKIP OPD Tahun 2022 anggaran terkait pandemi covid-19, namun demikian Dinas Perikanan Bengkulu Utara tetap optimis mendapatkan nilai BB dengan range nilai berkisar diantara 70 – 80.

Adapun kiat-kiat Dinas Perikanan dalam usaha meningkatkan nilai predikat AKIP SKPD di Tahun 2024 adalah Dinas Perikanan melakukan review SAKIP dan terus berkoordinasi melalui ORTALA serta melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh KEMENPAN RB sebagai berikut :

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja, mulai dari level pimpinan tingkat atas sampai dengan indikator kinerja di level individu pegawai staf;

Telah disusunnya Reviu Cascade Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sampai ke staf

Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;

Telah dilakukannya reviu RENSTRA untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan tersebut

Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja sehingga mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja untuk monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, agar mampu mewujudkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi;

Telah dilakukannya Reviu Pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Perikanan sesuai dengan TUPOKSINYA sehingga lebih mengandankan pada pengukuran keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkatan Pimpinan level atas sampai dengan staf

Sedangkan untuk progres perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**PROGRES PERBAIKAN DAN EVALUASI AKIP DINAS PERIKANAN
KAB. BENGKULU UTARA**

Before	After
SAKIP Dinas Perikanan (RENSTRA, Cascading, IKU, Perjanjian Kinerja, RENUA, Laporan Kinerja, Rencana Aksi) belum seluruhnya terinput ke dalam aplikasi E-SAKIP, belum baik/terukur sehingga kurang berkualitas	Telah dilakukannya perbaikan SAKIP melalui Reviu SAKIP Dinas Perikanan (Reviu Renstra, Cascading, IKU, Perjanjian Kinerja, RENUA, Laporan Kinerja, Rencana Aksi) yang dituangkan ke dalam aplikasi E-SAKIP sehingga menjadi terukur, lebih baik dan berkualitas.
Kepala Dinas belum memahami sepenuhnya serta belum mampu menjelaskan SAKIP secara keseluruhan	Kepala Dinas telah terlibat sepenuhnya serta telah mampu menjelaskan SAKIP secara proporsional
Belum seluruhnya ASN pada Dinas Perikanan memiliki ukuran dan target kinerja	Setiap ASN di Dinas Perikanan sudah memiliki ukuran dan target kinerja dan tertuang dalam perjanjian kinerja mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf yang akan dijadikan sebagai dasar pemberian REWARD dan SANKSI
Program/kegiatan belum efektif dalam pencapaian sasaran strategis	Telah dilakukan Reviu Renstra sehingga dapat disusun program/kegiatan yang fokusnya untuk pencapaian sasaran strategis dan menjadikan anggaran lebih efisien

Adapun Program dan kegiatan pendukung pelaksanaan sasaran ke -2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.5 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan pendukung sasaran ke 2

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.700.000,-	32.664.000,-

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Tabel II.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkulu Utara

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 Thn n-2	Tahun 2023 Thn n-1	Tahun 2024 Thn n	Tahun 2025 Thn n+1	Tahun 2022 Thn n-2	Tahun 2023 Thn n-1	Tahun 2024 Thn n	Tahun 2025 Thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
	Bidang Kelautan dan Perikanan											
2.2.5	Kelautan dan Perikanan											
2.2.5.1	Produksi perikanan											
	Tangkap (ton)			6,220.58	6,326.33	6,446.53	6,581.91	6,220.10		6,446.53	6,581.91	
	Budidaya (ton)			15,036.87	15,217.31	15,430.35	15,692.67	14,948.01		15,430.35	15,692.67	
2.2.5.4	Konsumsi Ikan (Kg orang Per Tahun)			33.40	33.45	33.50	33.55	41.38		33.50	33.55	
2.2.5.4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)			57.75	67.28	77.91	77.91	98.73		77.91	77.91	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan perangkat pemerintah daerah, tentu mempunyai perencanaan strategi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan keberadaan sebagai unsur daerah tentu akan memberikan rincian atas program kegiatan yang bertanggung jawab dan dapat terukur baik kemajuan maupun kelemahannya, sehingga akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

a. Pernyataan Visi Kepala Daerah

Dengan mengacu pada keberadaan sebagai unsur daerah yang mengemban tugas dengan berbagai upaya untuk percepatan pembangunan perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara mendukung visi Kepala dan wakil Kepala Daerah yaitu :

Terwujudnya masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Berkualitas

b. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka harus didukung dengan misi, adapun misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan bidang perikanan adalah terdapat pada misi 3 (tiga) yaitu:

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan

Dalam rangka pelaksanaan mendukung misi tiga Kepala Daerah adalah dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi di Dinas Perikanan sebagai berikut :

- a. Mengajak dan membina masyarakat perikanan untuk sama-sama memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan agar lebih dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam meningkatkan usahanya serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

- b. Peningkatan penerapan IPTEK dalam mengelola sumberdaya Perikanan. Usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan di Bengkulu Utara merupakan usaha yang turun temurun. Adakalanya mereka masih menggunakan tradisi lama, untuk mencapai hasil yang maksimal tentu harus ada inovasi teknologi melalui Kaji Terap Teknologi sehingga didapat paket teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan baik teknologi budidaya, teknologi penangkapan dan teknologi pasca panen. Diharapkan penerapan IPTEK ini dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi perikanan.
- c. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan karena dalam tubuh ikan terdapat banyak mengandung protein dan terdapat zat omega 3 dan unsur lainnya. Omega 3 dapat merangsang kinerja otak sehingga masyarakat lebih cerdas dan sehat. Target konsumsi ikan kabupaten adalah 37,48 kg/kapita/tahun.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana sumberdaya perikanan dalam pembangunan perikanan tentunya perlu dipersiapkan sarana dan prasarana baik untuk perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan seperti : TPI, Pabrik Es, *Cold Storage*, SPDN, Pasar Ikan Tradisional dan lain-lain maupun untuk perikanan budidaya seperti Balai Benih Ikan (BBI) serta sarana penunjang lainnya. Semua ini antara lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan dengan sebaik-baiknya.
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lahan dan perairan termasuk penggunaan alat dan bahan penangkapan serta bahan pengolahan hasil perikanan. Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tentu akan menyebabkan kemunduran sumberdaya hayati perairan yang selanjutnya perairan akan menjadi kritis, gersang dan rusak. Untuk itu perlu penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan bahan dan alat terlarang seperti : racun, tuba, bom, potas,

setrum/listrik dan alat tangkap terlarang lainnya serta penggunaan bahan yang berbahaya untuk kesehatan dalam pengolahan hasil perikanan.

Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan pada nelayan kecil maupun pada pembudidaya ikan air tawar mengalami beberapa permasalahan dan hambatan yaitu :

1. Pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan kecil mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi/hasil tangkapan ikan disebabkan oleh :
 - Kondisi cuaca yang tidak menentu (sering badai) menyebabkan jumlah melaut lebih sedikit.
 - Sebagian besar armada penangkapan yang dipakai berukuran kecil yang beroperasi *one day fishing* dengan jangkauan *fishing ground* lebih dekat dan jumlah alat tangkap yang terbatas serta kurang bervariasi.
 - Belum beroperasinya TPI secara optimal serta keterbatasan permodalan kurang mendorong kemajuan usaha penangkapan ikan.
 - Kurangnya investor dibidang usaha penangkapan ikan yang menanamkan modal.
 - Kualitas SDM masih rendah.
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap.
 - Wabah Covid -19
2. Pada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi ikan air tawar disebabkan oleh :
 - Masih rendahnya IPTEK pembudidaya ikan
 - Belum optimalnya sarana pembenihan, baik BBI maupun UPR sehingga belum didapatkannya benih yang bermutu, dengan jumlah yang cukup dan berkelanjutan.

- Keterbatasan operasional untuk BBI dan petugas penyuluh perikanan budidaya.
- Biaya produksi untuk kegiatan budidaya cukup besar (harga pakan ikan/pellet relatif mahal) sedangkan permodalan yang dimiliki terbatas.
- Lemahnya sistem pemasaran ikan budidaya.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- Wabah Covid -19

Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran maka lebih dahulu dirumuskan faktor- faktor kunci keberhasilan yang berpengaruh dalam menetapkan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan melihat *Strenght, Weakness, Opportunities* dan *Threatths* (SWOT). Selanjutnya analisis diarahkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam menetapkan pencapaian keberhasilan organisasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumberdaya manusia perikanan yang memadai (kualitas dan kuantitas).
- b. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan.
- c. Adanya uraian tugas yang jelas dan pedoman kerja yang memadai.
- d. Adanya komitmen yang kuat baik pemerintah maupun masyarakat perikanan dalam mewujudkan cita-cita nasional dan daerah.
- e. Adanya perangkat atau produk hukum yang jelas dan tegas baik untuk pengelola maupun terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan (SDKP) dan bahan pengolahan hasil perikanan yang berbahaya bagi kesehatan.

Dalam penentuan isu-isu penting/strategis, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara merumuskan beberapa catatan untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan , antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
2. Mahalnya harga pelet dan obat-obatan untuk budidaya ikan
3. Degradasi lingkungan pesisir laut dan garis pantai serta penurunan stok ikan.
4. Keterbatasan modal usaha baik usaha dibidang penangkapan ikan maupun budidaya ikan air tawar.
5. Minimnya investor yang menanamkan modalnya dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Rendahnya kualitas SDM Perikanan dan penerapan IPTEK dalam aktivitas perikanan.
7. Rendahnya penyerapan tenaga kerja bidang perikanan.
8. Keterbatasan sarana dan operasional dalam memproduksi benih ikan unggul.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perikanan, terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk lebih

jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel : II.7 Review terhadap Rancangan Awal (RANWAL) RKPD Tahun 2024

Kabupaten Bengkulu Utara

TABEL II.7
Review Terhadap Rancangan Akhir (RANHIR) RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu Utara

NAMA SKPD: DINAS PERIKANAN										
Rancangan Awal BKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN				5,045,080,011	URUSAN PEMERINTAHAN				5,045,080,011	
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				5,045,080,011	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				5,045,080,011	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	100	4,045,080,011	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	100	4,045,080,011	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	69,875,947	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	69,875,947	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	27,432,347	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	27,432,347	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	3,639,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	3,639,200	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2	3,030,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2	3,030,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	2,176,140	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	2,176,140	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2	1,091,280	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2	1,091,280	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	2	29,506,980	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	2	29,506,980	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	3,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	3,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)	100	2,545,284,519	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)	100	2,545,284,519	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	26	2,483,561,284	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	26	2,483,561,284	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	60,723,235	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	60,723,235	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	1,000,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	1,000,000	

1	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					11
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	100	43,400,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	100	43,400,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	43,400,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	43,400,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan administrasi umum (%)	90	136,258,819	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan administrasi umum (%)	90	136,258,819	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	5,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	5,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	23	38,348,128	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	23	38,348,128	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	5	5,102,691	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	5	5,102,691	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	2	7,808,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	2	7,808,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	35	80,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	35	80,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)	100	181,260,726	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)	100	181,260,726	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	37,500,726	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	37,500,726	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	143,760,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	143,760,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)	100	69,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)	100	69,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	2	40,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	2	40,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertoran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertoranannya (unit)	21	24,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertoran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertoranannya (unit)	21	24,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	18	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	18	5,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,9	300,000,000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,9	300,000,000	
Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum (kegiatan)	10	300,000,000	Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum (kegiatan)	10	300,000,000	
Perjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	6	300,000,000	Perjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	6	300,000,000	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Peningkatan Produk Perikanan Budidaya (%)	1,4	600,000,000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Peningkatan Produk Perikanan Budidaya (%)	1,4	600,000,000	
Pemberdayaan Pembudidaya ikan Kecil	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAXAN) yang diberdayakan (kelompok)	18	30,000,000	Pemberdayaan Pembudidaya ikan Kecil	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAXAN) yang diberdayakan (kelompok)	18	30,000,000	
Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	25	30,000,000	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	25	30,000,000	
Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang aktif (kelompok)	151	570,000,000	Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang aktif (kelompok)	151	570,000,000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	5	480,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	5	480,000,000	
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (Dokumen)	1	90,000,000	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (Dokumen)	1	90,000,000	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)	3	100,000,000	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)	3	100,000,000	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase peningkatan bahan baku ikan segar (laut dan tawar) yang tersedia (%)	5	100,000,000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase peningkatan bahan baku ikan segar (laut dan tawar) yang tersedia (%)	5	100,000,000	
Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	17	100,000,000	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	17	100,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun rencana kerja pembangunan perikanan, program dan kegiatan yang terkait dengan urusan pilihan perikanan telah dibahas bersama-sama oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan mempertimbangkan masukan dari hasil Musrenbangcam (musyawarah rencana pembangunan kecamatan) dan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan, meliputi:

- a. Usulan masyarakat melalui Musrenbang kecamatan yang diakomodir kedalam aplikasi SIPD yaitu:
 1. Sarana dan prasarana nelayan
- b. Usulan Pokdakan dan KUB nelayan melalui proposal yaitu :
 1. Penyediaan bibit ikan unggul untuk ikan nila, gurame dan patin
 2. Pengadaan pakan ikan gratis
 3. Pengadaan alat-alat produksi perikanan
 4. Jalan Produksi pembudidaya ikan
 5. Pengadaan sarana dan prasarana nelayan , seperti perahu dan motor roda tiga.
 6. Pengadaan calon induk ikan Nila

Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program dan kegiatan dari pihak yang berkepentingan dapat dilihat Tabel sebagai berikut ini :

Tabel : II.8 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu Utara

Tabel II.8
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024 KABUPATEN BENGKULU UTARA

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
2		4	5	6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil				
1. Sarana dan prasarana nelayan	Kecamatan Enggano	meningkatnya produksi perikanan Tangkap	1 paket	Belum ada Proposal
2. Penyediaan bibit ikan unggul untuk ikan nila, gurame dan patin	Kawasan minapolitan	meningkatnya produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal
3. Pengadaan pakan ikan gratis	Kawasan minapolitan	meningkatnya produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal
4. Pengadaan alat-alat produksi perikanan	Kawasan minapolitan	meningkatnya produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal
5. Jalan Produksi pembudidaya ikan	Kawasan minapolitan	meningkatnya produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal
6. Pengadaan sarana dan prasarana nelayan , seperti perahu dan motor roda tiga	Kawasan minapolitan	meningkatnya produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal
7. Pengadaan calon induk ikan Nila	Kawasan minapolitan	meningkatnya produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan presiden Joko Widodo dan wakil presiden K.H Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

MISI :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Menncerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap bangsa dan Memberikan rasa Aman pada Seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk mendukung visi dan misi Presiden 2020-2024 agar selaras dengan program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara telah mempunyai vis, misi dan moto antara lain :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas.

Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan.

Moto : Apapun Minumnya Makanannya Tetap Ikan.

Keberadaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 61). Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Dinas Perikanan Tipe B yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan yang sejalan dengan visi dan misi Presiden.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Renstra KKP Tahun 2020-2024), Visi KKP Tahun 2020-2024 adalah menjabarkan arahan Presiden bahwa **“Laut adalah Masa Depan Bangsa”** yaitu mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi KKP yaitu:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga misi tersebut dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan prioritas pembangunan ke depan, diantaranya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, memperkuat pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan yang disusun menjabarkan 3 (tiga) pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan termasuk strategi dan langkah operasional yang dijabarkan sebagai berikut

1. Kebijakan Pokok

- a. membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan dalam rangka membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan dengan strategi :

1) Pemberantasan IUU *Fishing* dan *Destructive Fishing*

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:

- a) pencegahan terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- b) pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) operasional pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
- d) operasi armada pengawasan SDKP; dan
- e) penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

2) Penguatan Sistem Karantina Ikan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah :

- a) penguatan sistem karantina ikan;
- b) sinergi pengawasan lalu lintas ikan;
- c) pelayanan tindak karantina ikan di *entry* dan *exit point* serta pos lintas batas (*gateway*) wilayah perbatasan;
- d) pengendalian agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan bersifat invasif.

b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan strategi :

1) pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan sumber daya perikanan budidaya bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan

pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan strategi optimalisasi produksi, dan produktivitas perikanan tangkap, penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, peningkatan keberdayaan nelayan untuk mewujudkan usaha perikanan tangkap yang berdaya saing dan berkelanjutan.

- 2) pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- 3) pengelolaan sumber daya kelautan yang berdaya saing dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) zonasi dan tata ruang laut;
 - b) pengembangan produk dan jasa kelautan;
 - c) konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - d) mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
 - e) penanganan pencemaran laut dan sampah plastik; dan
 - f) penumbuhan budaya bahari, riset, dan data kelautan.
- 4) Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang sensitif terhadap kerentanan bencana dan perubahan iklim. Dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
 - b) pengarusutamaan pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim; dan
 - c) penyiapan program khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di pesisir dan pulau-pulau kecil.

- c. Peningkatan mutu, nilai tambah, dan daya saing dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi bidang kelautan dan perikanan dengan strategi
 - 1) peningkatan mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan
 - 2) peningkatan usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
- d. Mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan dengan strategi :
 - 1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
 - 2) peningkatan inovasi teknologi dan riset bidang kelautan dan perikanan.
- e. kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual dilakukan melalui pendekatan transformasi digital dengan strategi *one data* KKP, keterbukaan informasi secara bertanggung jawab berbasis *website* dan transparansi perizinan berbasis *online system* dan penetapan kebijakan berbasis riset dan pengetahuan faktual.
- f. optimasi reformasi birokrasi menuju birokrasi KKP berkelas dunia dilakukan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi KKP berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu :
 - 1) *human capital*;
 - 2) *organization capital*;
 - 3) *financial & planning capital*;
 - 4) *information capital*;
 - 5) *control capital*.

2. Kebijakan pengarusutamaan

a. Gender

Untuk melaksanakan arah kebijakan terkait gender, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah

percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang mencakup :

- 1) penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- 2) penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di KKP;
- 3) penyiapan *roadmap* PUG;
- 4) penyusunan data terpilah;
- 5) pengembangan statistik gender;
- 6) pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit kerja eselon I di KKP dan antar pusat daerah;
- 7) pembuatan profil gender;
- 8) monitoring dan evaluasi PUG KKP.

b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan KKP dilakukan dengan strategi peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), *talent management* untuk pengembangan pola rekrutmen dan suksesi pimpinan, *assessment center* untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai secara rutin, dan *carrier plan* untuk penyiapan pola karir pegawai sesuai kompetensi dan bakat, *reward and punishment*, mengelola, mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menjadikan SDM ASN sebagai modal, *information capital* (e-KKP dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *one data* serta *corporate university*, *organization capital* (*right sizing*/penataan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan, penataan birokrasi menuju *world class government*, *smart office and green building*, dan kerja sama yang memberikan *mutual benefit* pusat–daerah, antardaerah, dan internasional), *finansial capital* (*e-planning*, dan *e-budgeting*), dan *control capital* (penguatan sistem pengendalian *intern* dan pengawasan *intern*).

c. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu :

- 1) ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan; dan
- 3) kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka aksi tersebut memuat penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

d. Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

- 1) rehabilitasi wilayah pesisir (termasuk pembangunan *green belt*) dan lingkungan laut;
- 2) pengembangan kawasan pesisir tangguh;
- 3) sistem peringatan dini kebencanaan wilayah pesisir laut;
- 4) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- 5) modal.
- 6) Modal Sosial Budaya

Modal sosial budaya merupakan seperangkat nilai, norma, institusi, dan jejaring sosial, dan sumber daya kebudayaan lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Modal sosial budaya tersebut jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan peran nilai dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Strategi ini menempatkan kebudayaan sebagai ruh dalam pembangunan dan nafas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengarusutamaan modal sosial budaya dilakukan

dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mendayagunakan kekayaan budaya untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil.

f. Transformasi Digital

Penerapan transformasi digital di lingkungan KKP dilakukan melalui Penerapan SPBE KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran maka lebih dahulu dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan yang menjadi kunci dalam menetapkan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan melihat *Strength*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threats* (SWOT). Selanjutnya analisis diarahkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Faktor-faktor keberhasilan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumberdaya manusia perikanan yang memadai (kualitas dan kuantitas)
- b. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan
- c. Adanya uraian tugas yang jelas dan pedoman kerja yang memadai
- d. Adanya komitmen yang kuat baik pemerintah maupun masyarakat perikanan dalam mewujudkan cita-cita nasional dan daerah.

- e. Adanya perangkat atau produk hukum yang jelas dan tegas baik untuk pengelola maupun terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan dan bahan pengolahan hasil perikanan yang berbahaya bagi kesehatan.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah tersebut maka tujuan pembangunan perikanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan penerimaan daerah dan devisa negara dari hasil perikanan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil , pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya.
- d. Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan.
- e. Meningkatkan penerapan informasi teknologi serta kelembagaan.
- f. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan.
- g. Meningkatkan kinerja yang profesional aparat Dinas Perikanan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan di Bengkulu Utara, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 dalam periode 2022 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja pembinaan akuntabilitas kinerja
- b. Meningkatnya pertumbuhan produksi pada sektor perikanan

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 dan Rencana Kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk menunjang kelancaran proses administrasi kantor dan mendukung akuntabilitas kinerja. Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah ketersediaan alat tulis kantor dan sarana penunjang administrasi kantor, ketersediaan sarana kebersihan, komunikasi, listrik dan sumber daya air serta ketersediaan biaya operasional kantor selama 1 tahun anggaran, selain itu juga dalam upaya meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja SKPD.

Sedangkan untuk indikator kinerjanya adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif, efisien, lancar dan tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan produksi perikanan tangkap pertahun.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui peningkatan sarana dan prasarana kelompok pembudidaya ikan serta pembinaan sosialisasi mengenai pengembangan budidaya ikan yang baik. Adapun indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pertahun.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

- a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

- Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pengolahan ikan guna meningkatkan nilai tambah/jual produksi perikanan untuk mendukung perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat. Adapun indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan produksi pengolahan ikan pertahun.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 serta prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel III.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bengkulu Utara

Nama SKPD : Dinas Perikanan

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	5	7	10			11	
3	URUSAN PEMERINTAHAN				4,565,379,727			6,180,497,039	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4,565,379,727			6,180,497,039	
3 25 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100	3,110,353,762	APBD	100	4,886,436,876	
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100	69,874,800	APBD	100	85,743,815	
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	27,432,000	APBD	2	35,495,175	
3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	3,639,200	APBD	2	3,139,719	
3 25 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	3,030,000	APBD	2	400,000	
3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	2,175,800	APBD	2	1,676,291	
3 25 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	1,091,200	APBD	2	525,600	
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	29,506,600	APBD	1	24,507,030	
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	3,000,000	APBD	2	20,000,000	

3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100	2,555,584,200	APBD	100	4,156,739,947
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Kabupaten Bengkulu Utara	26	2,493,861,000	APBD	31	4,067,989,744
3	25	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	-	-	APBD	2	5,636,142
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	12	60,723,200	APBD	12	80,614,061
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara	12	1,000,000	APBD	2	2,500,000
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100	43,400,000	APBD	100	43,400,000
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	43,400,000	APBD	2	43,400,000
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah (persentase)	Kabupaten Bengkulu Utara	-	-	APBD	100	47,000,000
3	25	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Kabupaten Bengkulu Utara	-	-	APBD	45	22,000,000
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Kabupaten Bengkulu Utara	-	-	APBD	1	25,000,000
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	90	191,232,600	APBD	95	157,458,347
3	25	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Kabupaten Bengkulu Utara	5	50,000,000	APBD	6	18,000,000
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	Kabupaten Bengkulu Utara	23	38,322,100	APBD	23	76,544,748
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Kabupaten Bengkulu Utara	5	15,102,500	APBD	5	5,102,691
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	7,808,000	APBD	2	7,810,908

3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara	35	80,000,000	APBD		35	50,000,000
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		11	38,000,000
3	25	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		1	25,000,000
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		5	3,000,000
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		5	10,000,000
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100	183,662,162	APBD		100	184,097,767
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara	12	37,502,162	APBD		12	36,497,767
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara	12	146,160,000	APBD		12	147,600,000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100	66,600,000	APBD		100	173,997,000
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	40,000,000	APBD		2	35,000,000

3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara	21	21,600,000	APBD		21	24,997,000
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara	18	5,000,000	APBD		19	5,000,000
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		6	109,000,000
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	1.9	255,000,000	APBD		2,1	425,000,000
3	25	03	2.01		Fengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dtusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum (kegiatan)	Kabupaten Bengkulu Utara	10	172,438,000	APBD		10	225,000,000
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		1	50,000,000
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	172,438,000	APBD		2	95,000,000
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		6	80,000,000
3	25	03	2.02		Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nelayan yang handal (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	91,58	82,562,000	APBD		94,97	120,000,000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	Kabupaten Bengkulu Utara	220	82,562,000	APBD		250	70,000,000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		86	50,000,000
3	25	03	2.03		Fengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase kepuasan nelayan terhadap pelayanan tempat pelelangan ikan (%)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		85	80,000,000
3	25	03	2.03	02	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (layanan)	Kabupaten Bengkulu Utara		-	APBD		7	80,000,000

3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	1,4	1,100,025,965	APBD		1,7	644,120,326
3	25	04	2.02	Femderdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang diberdayakan (kelompok)	Kabupaten Bengkulu Utara	18	30,000,000	APBD		19	150,000,000
3	25	04	2.02	01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok)	Kabupaten Bengkulu Utara	-		APBD	30	70,000,000
3	25	04	2.02	04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	Kabupaten Bengkulu Utara	25	30,000,000	APBD	30	80,000,000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang aktif (kelompok)	Kabupaten Bengkulu Utara	151	1,070,025,965	APBD	152	494,120,326
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara	5	980,025,965	APBD	6	190,000,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota (unit)	Kabupaten Bengkulu Utara	-		APBD	11	152,060,163
3	25	04	2.04	05	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (Dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	1	90,000,000	APBD	1	72,060,163
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Luas lahan untuk pembudidaya ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi (ha)	Kabupaten Bengkulu Utara	-		APBD	1	80,000,000
3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	3	100,000,000	APBD	3,5	224,939,837
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan terkait tanda daftar Usaha Hasil Perikanan(rekomendasi)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD	5	5,000,000

3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara			-	APBD		1	5,000,000
3	25	06	2.02		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (rekomendasi)	Kabupaten Bengkulu Utara			-	APBD		5	70,000,000
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko (unit usaha)	Kabupaten Bengkulu Utara			-	APBD		11	70,000,000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan bahan baku ikan segar (laut dan tawar) yang tersedia (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	5	100,000,000		APBD		8	149,939,837
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota (ton)	Kabupaten Bengkulu Utara			-	APBD		397,69	60,000,000
3	25	06	2.03	02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang terfasilitasi (pelaku usaha)	Kabupaten Bengkulu Utara	17	100,000,000		APBD		20	89,939,837

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat terbatasnya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Prioritas Daerah.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi perikanan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan bidang perikanan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan perikanan tahap berikutnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan mempertimbangkan prioritas daerah dapat dilihat pada Tabel IV.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakirasan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bengkulu Utara

NAMA SKPD: DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2024)	Prakirasan Maju (2025)	Jenis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Program/ Out come		Kegiatan /Sub Kegiatan									
					Uraian	Target	Uraian	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	URUSAN PILIHAN								4,565,379,727	6,180,497,039						
	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan								4,565,379,727	6,180,497,039						
	Dinas Perikanan								4,565,379,727	6,180,497,039						
3	25	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (N)	100		100	3,110,353,762	4,886,436,876	Lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (N)		100		68,876,800	85,743,815	Lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		2		27,432,000	35,495,175	Lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)		2		3,639,200	3,139,719	Lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)		2		3,030,000	400,000	baru	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen DPA dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)		2		2,175,800	1,676,291	Lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)		2		1,091,200	525,600	Lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2		29,506,600	24,507,030	Lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)		2		3,000,000	20,000,000	baru	Dinas Perikanan BU

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sesaran Pembangunan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2024)	Prakiraan Maju (2025)	Jenis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Program/ Out come		Kegiatan /Sub Kegiatan									
					Uraian	Target	Uraian	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)	100	2,555,584,200	4,156,739,947	Lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	29	2,493,861,000	4,067,989,744	Lanjutan	Dinas Perikanan BU	
3	25	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)			5,636,142	baru	Dinas Perikanan BU	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	60,723,200	80,614,061	Lanjutan	Dinas Perikanan BU	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (laporan)	2	1,000,000	2,500,000	baru	Dinas Perikanan BU	
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan		Persentase pemenuhan administrasi BMD Perangkat Daerah (%)	100	43,400,000	43,400,000	Lanjutan	Dinas Perikanan BU	
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	43,400,000	43,400,000	Lanjutan	Dinas Perikanan BU	
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan		Persentase pemenuhan kepegawaian Perangkat Daerah (persentase)			47,000,000	baru	Dinas Perikanan BU	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan pakat dinas beserta atribut kelengkapannya	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara		Jumlah Paket Pakat Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			22,000,000	baru	Dinas Perikanan BU	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)			25,000,000	baru	Dinas Perikanan BU	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara		Persentase pemenuhan administrasi umum (%)	90	191,232,600	157,458,347	lanjutan	Dinas Perikanan BU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2024)	Praktisan Maju (2025)	Jenis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Program/ Out come		Kegiatan /Sub Kegiatan									
					Uraian	Target	Uraian	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
3	25	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	5	50,000,000	18,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	23	38,322,100	76,544,748	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	5	15,102,500	5,102,691	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	2	7,808,000	7,810,908	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	35	80,000,000	50,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang MISK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah pengadaan BMD (unit)			38,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)			25,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)			3,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)			10,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan			Persentase pemenuhan jasa penunjang (%)	100	183,662,162	184,087,767	lanjutan	Dinas Perikanan BU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Bantuan Pembangunan	Lokasi	Indikator Kinerja				Page Indikatorif (2024)	Praktoran Maja (2025)	Jenis Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/ Out come		Kegiatan /Sub Kegiatan					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)			80,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Persentase peningkatan nelayan yang handal (%)	91,58	82,562,000	120,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	220	82,562,000	70,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagannya (kelompok)			50,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Persentase kepuasan nelayan terhadap pelayanan tempat pelelangan ikan (%)			80,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 03 2.03 02	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (layanan)			80,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	1,4			1,100,025,965	150,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAK) yang diberdayakan (kelompok)	18	30,000,000	70,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 04 2.02 01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok)			80,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 04 2.02 04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan , teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan,kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	25	30,000,000	494,120,325	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang aktif (kelompok)	151	1,070,025,965	190,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2024)	Praktoran Maju (2025)	Jenis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pemangku Daerah Penanggung Jawab
					Program/ Out come		Kegiatan /Sub Kegiatan					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	37,502,162	36,497,767	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	146,160,000	147,600,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)	100	46,600,000	171,997,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	2	40,000,000	35,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	21	21,600,000	24,997,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Dinas Perikanan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	18	5,000,000	5,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)			109,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 08	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,5			255,000,000	425,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 08 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum (kegiatan)	10	172,438,000	225,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 08 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)			50,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 08 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia (unit)	2	172,438,000	95,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU

Kode	Uraian/Sidang Urusan Pemertintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2024)	Praktisrn Maju (2025)	Jenis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penasngat Daerah Penanggung Jawab
					Program/ Out come		Kegiatan /Sub Kegiatan					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota (unit)	5	980,025,965	152,060,163	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 04 2.04 03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota (unit)			72,060,163	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 04 2.04 05	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (Dokumen)	1	90,000,000	80,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 04 2.04 06	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi (ha)				baru	Dinas Perikanan BU
3 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase Peningkatan Produksi (lahan Perikanan (%))	3			100,000,000	224,939,837 5,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan terkait tanda daftar Usaha Hasil Perikanan (rekomendasi)			5,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah dokumen Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (dokumen)			70,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 06 2.02	Pembinaan mutu dan kesmanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk memiliki Iain Pangan Industri Rumah Tangga (rekomendasi)			70,000,000	baru	Dinas Perikanan BU
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan pertanian berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko (unit usaha)			149,939,837	baru	Dinas Perikanan BU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2024)	Prakiraan Maju (2025)	Jenis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Peningkat Daerah Penanggung Jawab				
					Program/ Out come		Kegiatan /Sub Kegiatan									
					Uraian	Target	Uraian	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Persentase peningkatan bahan baku ikan segar (leut dan tawar) yang tersedia (%)	5	100,000,000	60,000,000	lanjutan	Dinas Perikanan BU
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota (ton)			89,939,837	baru	Dinas Perikanan BU
3	25	06	2.03	02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Penguatan Infrastruktur Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan (Tangkap, Budidaya, Olah dan Pemasaran Hasil Perikanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang terfasilitasi (pelaku usaha)	17	100,000,000	89,939,837	lanjutan	Dinas Perikanan BU

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 disusun dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang kemudian berubah menjadi Rencana Kerja untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah tahun 2024.

Fokus perhatian pembangunan bidang perikanan tahun 2024 meliputi, peningkatan sarana prasarana kelompok pembudidaya ikan dan nelayan kecil, pengolahan hasil perikanan, diversifikasi produk olahan perikanan, serta pengembangan kawasan minapolitan. Adapun kaidah – kaidah pelaksanaannya akan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan sumber anggaran pendanaan (APBD, APBD- Prov, Hibah APBN, DAK).

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 dibuat sebagai pedoman bagi aparat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan.